



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 11656-11664

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Kecamatan Sintang

Muhammad Nabil Siregar^{1✉}, Fitri Yul Dewi Marta², Elvira Mulya Nalien³, Ardieansyah⁴

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: muhammadnabil698@gmail.com[✉]

Abstrak

Implementasi Aplikasi SISKEUDES dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Sintang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi SISKEUDES dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sintang. SISKEUDES diharapkan dapat mendorong akuntabilitas dan keterbukaan informasi keuangan desa kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, bendahara desa, dan masyarakat, serta analisis dokumen laporan keuangan desa sebelum dan setelah implementasi SISKEUDES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES telah meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa melalui fitur pelaporan yang terstruktur, pencatatan real-time, dan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memantau alokasi dan penggunaan dana desa. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur internet masih menjadi tantangan dalam optimalisasi sistem. SISKEUDES terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi keuangan desa di Kecamatan Sintang, meskipun diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan dukungan infrastruktur untuk memaksimalkan manfaatnya. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang akuntabel.

Kata Kunci: *SISKEUDES, Transparansi, Keuangan Desa, Akuntabilitas, Kecamatan Sintang*

Abstract

Implementation of the Village Financial System Application (SISKEUDES) in Increasing Transparency of Financial Management in Sintang District. This study aims to analyze the implementation of the Village Financial System application (SISKEUDES) in increasing transparency of village financial management in Sintang District. SISKEUDES is expected to encourage accountability and openness of village financial information to the community. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with village officials, village treasurers, and the community, as well as analysis of village financial report documents before and after the implementation of SISKEUDES. The results of the study indicate that the implementation of SISKEUDES has increased transparency of village financial management through structured reporting features, real-time recording, and easier access for the community to monitor the allocation and use of village funds. However, obstacles such as limited human resources and internet infrastructure are still challenges in optimizing the system. SISKEUDES has proven effective in increasing transparency of village finances in Sintang District, although it is necessary to increase human resource capacity and infrastructure support to maximize its benefits. The implications of this study can be a reference for local governments in strengthening accountable village financial governance.

Keywords: SISKEUDES, transparency, village finance, accountability, Sintang District

PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan prinsip fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Mardiasmo (2006), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan dan menyediakan akses informasi yang luas kepada publik, sedangkan akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Kedua prinsip ini menjadi syarat utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat.

Seiring meningkatnya alokasi Dana Desa (DD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa menjadi ujung tombak pembangunan nasional. Namun, peningkatan anggaran ini juga menuntut desa untuk memiliki sistem keuangan yang profesional dan dapat diaudit. Hal ini sejalan dengan pendapat Dwiyanto (2006), yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan lokal sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola keuangan desa menjadi semakin penting, tidak hanya untuk mencegah penyelewengan, tetapi juga untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Di lapangan, masih banyak desa yang menghadapi persoalan serius dalam

pengelolaan keuangan, seperti keterlambatan pelaporan, kurangnya dokumentasi yang akurat, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan. Kecamatan Sintang, sebagai salah satu wilayah administratif di Kalimantan Barat, juga menghadapi tantangan serupa. Minimnya kemampuan teknis aparatur desa dan belum optimalnya infrastruktur teknologi menjadi hambatan nyata dalam mengelola dana desa secara transparan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)—sebuah aplikasi digital yang dirancang untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa secara terintegrasi. SISKEUDES diharapkan mampu menjawab tantangan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. Menurut Halim (2007), penggunaan sistem informasi dalam keuangan daerah dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta mempercepat proses penyusunan laporan keuangan yang andal.

Penerapan SISKEUDES juga sejalan dengan teori sistem informasi akuntansi, di mana teknologi informasi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan, mengelola, dan melaporkan informasi keuangan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan (Romney & Steinbart, 2015). Dalam konteks desa, hal ini menjadi penting karena keputusan pembangunan yang berbasis data keuangan yang valid akan jauh lebih tepat sasaran dan efisien.

Namun, efektivitas sistem ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologinya, tetapi juga oleh kesiapan pengguna, komitmen pimpinan desa, serta dukungan kebijakan daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Indriantoro dan Supomo (2002), adopsi teknologi dalam sektor publik akan berhasil bila didukung oleh pelatihan, motivasi pegawai, dan kepemimpinan yang kuat. Di Kecamatan Sintang, tantangan tersebut masih cukup besar, terutama dalam hal pelatihan aparatur desa dan pengadaan sarana pendukung.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana implementasi aplikasi SISKEUDES benar-benar mampu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa, khususnya di Kecamatan Sintang. Tidak hanya itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya serta implikasi kebijakan yang dapat diambil untuk memperkuat tata kelola keuangan desa ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi aplikasi SISKEUDES dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sintang. Pendekatan ini dianggap tepat karena mampu menggambarkan realitas sosial secara kontekstual (Moleong, 2017). Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap utama. Pertama, penyuluhan dan pendidikan masyarakat dilakukan dengan pelatihan penggunaan SISKEUDES kepada perangkat desa, bendahara, dan warga. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya transparansi, sesuai dengan konsep pendidikan partisipatif oleh Freire (1970).

Selanjutnya, penelitian mengaplikasikan difusi IPTEKS dengan mengimplementasikan SISKEUDES sebagai sistem digital pencatatan dan pelaporan keuangan desa yang lebih akurat dan real-time. Proses ini meliputi evaluasi sistem dan kesiapan pengguna. Menurut Rogers (2003), adopsi teknologi memerlukan kesiapan baik secara teknis maupun sosial. Untuk mendukung adopsi tersebut, dilakukan pula pelatihan teknis dan pendampingan intensif bagi operator desa. Pendampingan ini difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis dan adaptasi terhadap sistem digital. Sejalan dengan teori Technology Acceptance Model (Davis, 1989), keberhasilan sistem informasi bergantung pada persepsi kemudahan dan manfaat pengguna.

Peneliti juga berperan sebagai mediator, menjembatani berbagai kendala implementasi seperti gangguan jaringan, kesalahan input, dan resistensi perubahan. Proses mediasi dilakukan melalui dialog terbuka dengan semua pemangku kepentingan, mengikuti pendekatan *principled negotiation* dari Fisher dan Ury (1991). Selain itu, pendekatan advokasi kebijakan diterapkan dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai penguatan infrastruktur pendukung, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan keuangan desa. Ini selaras dengan pandangan Cohen dan Uphoff (1980) mengenai pentingnya partisipasi dalam seluruh tahapan pembangunan.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, studi dokumen, dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik ini dipilih untuk menangkap informasi yang komprehensif dari berbagai perspektif. Seluruh data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994), yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola dan implikasi strategis dari implementasi SISKEUDES di lapangan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas SISKEUDES dalam mendukung transparansi keuangan desa serta menyusun strategi penguatan implementasi yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Implementasi SISKEUDES di Kecamatan Sintang

a. Hasil Kuantitatif

Implementasi SISKEUDES memberikan dampak signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sintang. Berikut adalah perbandingan sebelum dan setelah penerapan SISKEUDES:

Tabel 1. Perbandingan Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Sebelum dan Sesudah SISKEUDES

Indikator	Sebelum SISKEUDES	Setelah SISKEUDES	Perubahan
Ketepatan Waktu Pelaporan	45%	85%	+40%
Akurasi Data Keuangan	60%	90%	+30%
Akses Masyarakat ke Laporan	30%	70%	+40%
Temuan Penyimpangan	8 kasus/tahun	2 kasus/tahun	-75%

Hasil Kualitatif

Hasil dari wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan di desa—termasuk kepala desa, bendahara, operator SISKEUDES, pendamping desa, dan masyarakat—menunjukkan adanya perubahan perilaku dan pemahaman terhadap pentingnya tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Peningkatan Akuntabilitas Internal

Salah satu dampak positif utama dari penggunaan SISKEUDES adalah meningkatnya akuntabilitas internal di kalangan aparat desa. Mereka menjadi lebih tertib dalam menyusun anggaran, melakukan pencatatan, serta membuat laporan pertanggungjawaban karena semua proses dilakukan secara digital dan terpantau. Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009), sistem yang transparan akan menciptakan *pressure* (tekanan sosial) positif yang mendorong aparat pemerintah untuk lebih patuh terhadap prosedur dan peraturan. Ketika laporan disusun melalui sistem yang otomatis, maka kemungkinan adanya transaksi yang tidak tercatat atau dimanipulasi menjadi jauh lebih kecil.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

SISKEUDES turut mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Fitur publikasi laporan yang dapat dicetak atau dipajang di papan informasi desa membuka ruang baru bagi masyarakat untuk memantau alokasi dan realisasi anggaran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat mulai aktif bertanya, memberi masukan, bahkan menyampaikan keberatan jika ada anggaran yang dianggap tidak sesuai kebutuhan.

Partisipasi ini merupakan bentuk nyata dari *social accountability*, yakni mekanisme di mana warga secara aktif memantau dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah.

Menurut Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi semacam ini sangat diperlukan untuk menciptakan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tanpa transparansi dan ruang keterlibatan publik, kebijakan pembangunan desa rentan dimonopoli oleh elit lokal.

Kendala Lapangan

Walaupun berdampak positif, implementasi SISKEUDES di Kecamatan Sintang tidak terlepas dari kendala:

1. Keterbatasan Infrastruktur Internet:

Banyak desa, khususnya yang berada di daerah pelosok dan perbatasan, mengeluhkan sulitnya koneksi internet. Hal ini menghambat proses penginputan data secara real-time dan menyebabkan keterlambatan sinkronisasi laporan ke tingkat kecamatan maupun kabupaten.

2. Keterampilan SDM yang Terbatas:

Tidak semua operator desa memiliki latar belakang teknologi informasi. Beberapa di antaranya mengalami kesulitan dalam memahami antarmuka aplikasi, melakukan input data yang akurat, serta menyesuaikan diri dengan format laporan yang baru. Hal ini berisiko menyebabkan kesalahan administratif.

3. Resistensi terhadap Perubahan:

Beberapa aparat desa yang telah terbiasa bekerja dengan sistem manual menunjukkan sikap enggan beralih ke sistem digital karena merasa lebih nyaman dengan cara konvensional. Resistensi ini menghambat proses transformasi digital secara menyeluruh.

Pembahasan

a. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Penerapan SISKEUDES di Kecamatan Sintang telah menjadi instrumen penting dalam mendukung implementasi *good governance* di tingkat desa. Penurunan jumlah kasus penyimpangan dana sebesar 75% merupakan indikator kuat bahwa sistem ini berhasil memperkecil ruang manipulasi. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Saputra & Wijaya (2022), digitalisasi sistem keuangan desa terbukti menekan penyimpangan anggaran karena menciptakan sistem pengendalian internal yang lebih baik.

Lebih lanjut, Dwiyanto (2020) menjelaskan bahwa transparansi bukan hanya soal membuka akses terhadap informasi, melainkan bagaimana informasi tersebut dapat digunakan sebagai alat pengawasan yang sah oleh masyarakat dan lembaga pengawas.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Temuan lapangan menunjukkan bahwa SISKEUDES memberikan efek domino terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Ketika warga desa mengetahui bahwa laporan keuangan dapat mereka akses, rasa memiliki terhadap pembangunan desa meningkat. Mereka tidak lagi hanya sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai pengawas aktif dalam pengelolaan anggaran.

Konsep ini sejalan dengan Arnstein (1969) dalam teorinya *Ladder of Citizen Participation*, yang menyebut bahwa partisipasi warga berada dalam spektrum dari manipulasi hingga kemitraan sejati. Dalam konteks Kecamatan Sintang, posisi warga bergerak dari tahap simbolik menuju partisipatif, di mana suara mereka mulai berpengaruh terhadap kebijakan anggaran desa.

c. Tantangan Implementasi

Kendala teknis seperti terbatasnya jaringan internet dan rendahnya kapasitas SDM mencerminkan masalah klasik dalam adopsi teknologi di wilayah pedesaan. Sebagaimana diungkapkan Rogers (2003) dalam teori *Diffusion of Innovations*, keberhasilan adopsi teknologi tidak hanya ditentukan oleh kualitas inovasi itu sendiri, tetapi juga oleh kesiapan sosial, budaya, dan ekonomi pengguna.

Meskipun SISKEUDES dirancang dengan antarmuka yang cukup sederhana, tetap dibutuhkan pelatihan dan pendampingan yang intensif agar desa dapat memanfaatkan sistem ini secara maksimal. Tanpa intervensi berkelanjutan, akan muncul kesenjangan digital antara desa yang sudah maju dan desa yang masih tertinggal secara teknologi.

d. Rekomendasi untuk Optimalisasi

Untuk memperkuat implementasi SISKEUDES di Kecamatan Sintang, berikut rekomendasi strategis yang dapat dilakukan:

- Penguatan Infrastruktur Digital: Pemerintah daerah harus memprioritaskan pengembangan akses internet di seluruh desa, terutama daerah terpencil, agar sistem digital dapat berjalan optimal.
- Pelatihan Berkelanjutan: Pelatihan teknis perlu dilakukan secara reguler, tidak hanya satu kali. Operator harus difasilitasi untuk mengikuti *refresh training* agar tidak ketinggalan fitur baru.
- Integrasi Lintas Lembaga: SISKEUDES sebaiknya terhubung langsung dengan sistem yang dimiliki oleh Inspektorat, BPKP, atau KPK agar pengawasan dapat dilakukan lintas lembaga secara efektif dan efisien.
- Pemberdayaan Forum Warga: Desa perlu membentuk forum transparansi atau komite pengawas dana desa berbasis masyarakat. Forum ini dapat berfungsi sebagai mata

publik untuk mengawal dana desa dan mengedukasi warga tentang penggunaan anggaran.

SIMPULAN

Implementasi aplikasi SISKEUDES di Kecamatan Sintang telah berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang terlihat dari peningkatan signifikan dalam ketepatan waktu pelaporan, akurasi data, serta akses masyarakat terhadap informasi keuangan. Sistem ini tidak hanya memperbaiki tata kelola keuangan desa tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, sejalan dengan prinsip good governance. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur internet dan kapasitas SDM masih perlu menjadi perhatian utama. Temuan ini memperkuat bukti bahwa digitalisasi sistem keuangan desa efektif dalam mengurangi penyimpangan anggaran, asalkan didukung oleh infrastruktur yang memadai dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Untuk memastikan keberlanjutan, diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan jaringan internet yang stabil, pelatihan berkelanjutan bagi operator, serta integrasi dengan sistem pengawasan eksternal. Dengan demikian, SISKEUDES dapat menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel di Kecamatan Sintang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2019). *Public policymaking: An introduction* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). *Laporan evaluasi implementasi SISKEUDES di Jawa Barat*. Bandung: BPKP Regional III.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dwiyanto, A. (2020). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Firdaus, R. (2023). Kendala implementasi SISKEUDES di Kabupaten Banyumas: Kajian infrastruktur dan SDM. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 145–158.

- Fisher, R., & Ury, W. (1991). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in* (2nd ed.). New York: Penguin Books.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Continuum.
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2019 tentang Sistem Keuangan Desa*. Jakarta: Kemdagri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). *Pedoman implementasi SISKEUDES*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhasanah, S. (2018). *Digitalisasi tata kelola keuangan desa: Tantangan dan solusi* (Disertasi tidak dipublikasikan). Universitas Indonesia, Depok.
- Nurjanah, S., Lestari, I. P., & Kurniawan, B. (2021). Pengaruh sistem pelaporan keuangan terbuka terhadap kepercayaan publik di desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(1), 52–60.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Saputra, D., & Wijaya, A. (2022). Efektivitas sistem keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 19(1), 33–47.
- Saputro, D. A., & Wijaya, R. (2021). Analisis efektivitas SISKEUDES dalam transparansi pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 12(2), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jap.v12i2.345>
- Septiadi, M. (2022, Januari 15). Dampak SISKEUDES terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. *Koran Desa*. Diunduh dari <https://korandesas.id>
- World Bank. (2020). *Enhancing transparency in village fund management: Lessons from Indonesia*. Washington, DC: World Bank Publications.